

**SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
UUD NRI TAHUN 1945**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD FAJAR SYAIFUDDIN

NBI: 1311900087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
UUD NRI TAHUN 1945**

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMMAD FAJAR SYAIFUDDIN

NBI : 1311900087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
UID NRI TAHUN 1945**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MOHAMMAD FAJAR SYAIFUDDIN

NBI: 1311900087

Dosen Pembimbing:


Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP: 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF UUD
NRI TAHUN 1945**

Oleh:

MOHAMMAD FAJAR SYAIFUDDIN

NBI: 1311900087

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 640/ST/FH/VI/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

TIM PENGUJI :

Ketua : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.
NPP: 20310880149

Sekretaris : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP: 20310200828

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP: 20310160711

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fajar Syaifuddin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

**“PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF UUD NRI
TAHUN 1945”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Fajar Syaifuddin

NBI: 1311900087

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fajar Syaifuddin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Evidence Of Law:

“PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU DPR DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Fajar Syaifuddin

NBI: 1311900087

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fajar Syaifuddin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF UUD NRI
TAHUN 1945”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Fajar Syaifuddin

NBI: 1311900087

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fajar Syaifuddin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Evidence Of Law:

“PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU DPR DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Fajar Syaifuddin

NBI: 1311900087

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan YME, penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, terdapat ungkapan bahwa penelitian skripsi merupakan karya tertinggi bagi seorang mahasiswa yang telah menempuh jenjang Strata satu, dan juga merupakan batu pijakan yang akan menjadi tumpuan penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian-penelitian ilmu hukum kedepannya, terlebih lagi bagi perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih secara tulus kepada mereka-mereka yang telah ikut andil dalam studi dan penelitian skripsi ini, diantaranya:

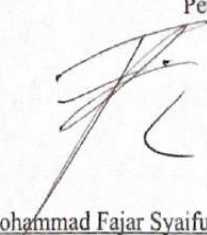
1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta masukan-masukan yang sangat berharga dalam proses jalanya skripsi ini;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu yang telah memberikan nasihat serta arahnya selama perkuliahan;
4. Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang memberikan nasihat serta arahnya selama perkuliahan;
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses administrasi selama perkuliahan;
6. UD. Putri Tunggal selaku keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta doa;
7. Keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Untag Surabaya Pro Rakyat (KAMUS PR) selaku kawan seperjuangan penulis selama menempuh jenjang Strata Satu;
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Gresik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (IMAGRES UNTAG SURABAYA) selaku teman perkuliahan penulis yang berasal dari Gresik;
9. Staff Sekretariat DPRD Kab. Gresik, atas ilmu-ilmu dalam ranah ketatanegaraan yang telah diberikan dan tentunya ilmu tersebut sangat berdampak bagi penulis;
10. Teman dekat penulis diantaranya: Nickholas Hartono, S.H., Gilang Putera Moertanto, S.H., Delvino Dirgantara Bastom, S.M., Dian Novianti, Nurul Islamiyah, Yafie Amaratun Sania, Putri Ika Fadilah, Nurisa Khoirul W., Rama Tri Mardiansyah, Ifan Afandi. Yang turut memberikan dukungan dikala penulis menyelesaikan skripsi ini

11. Serta teman sejawat diantaranya: Vikhy Koko Satriawan, Ahmad Sholihuddin A. H, Muhammad Hanif Sa'adillah dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta doa atas terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti tentunya masih menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 3 Juli 2023

Penulis



Mohammad Fajar Syaifuddin

NBI: 1311900087

Abstrak

Pengaturan mengenai prinsip pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam konstitusi diatur pada Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa makna Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 dan untuk mengetahui apakah sistem proporsional tertutup sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penafsiran originalisme makna Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 adalah: 1) karena partai politik merupakan wujud dari kemauan politik rakyat, 2) partai politik dapat menawarkan pandangan politik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, 3) keberadaan partai politik dalam pemilu bertujuan untuk memberikan alternatif pilihan bagi rakyat, 4) keikutsertaan partai politik dalam pemilu dimaksudkan untuk dapat menentukan pemenang mayoritas, dan 5) untuk membedakan dengan pemilu anggota DPD. Serta penerapan sistem pemilu merupakan *open legal policy* dan merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, dan jikalau memakai konsep kedaulatan rakyat, hal itu menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem pemilu yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945, hal ini perlu dikaitkan karena prinsip kedaulatan rakyat selalu menjadi satu kesatuan dalam kaitannya dengan pemilu, artinya penerapan sistem proporsional tertutup tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 karena akan menutup ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung, karena dalam sistem ini penentuan mengenai siapa saja calon anggota DPR yang akan duduk di parlemen adalah mutlak dari wewenang partai politik.

Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu DPR; Proporsional Tertutup

Abstract

Arrangements regarding the principle of elections for members of the House of Representatives in the constitution are regulated in Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research aims to find out what Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia means and to find out whether the closed proportional system is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative legal research, and uses two approaches, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of this research show that in the interpretation of originalism, the meaning of Article 22E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the NRI is: 1) because political parties are a manifestation of the political will of the people, 2) political parties can offer political views that are different from one another, 3) the existence of political parties in the election aims to provide alternative choices for the people, 4) the participation of political parties in the election is intended to be able to determine the majority winner, and 5) to distinguish with the election of DPD members. As well as the application of the electoral system is an open legal policy and is the authority of the legislator, and if using the concept of popular sovereignty, it shows that the open proportional system is more in accordance with the electoral system desired by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this needs to be linked because the principle of popular sovereignty is always a unity in relation to elections, meaning that the application of a closed proportional system is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it will close the space for the people to determine their choices directly, because in this system the determination of who the DPR candidates will sit in parliament is absolutely the authority of political parties.

Keywords: *Democracy; House of Representatives Election; Closed Proportionality*

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Abstrak.....	x
<i>Abstract</i>.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
a. Jenis Penelitian	4
b. Pendekatan Masalah.....	4
c. Sumber dan Jenis Hukum.....	5

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	5
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Kedaulatan Rakyat	7
2.2. Pengertian Demokrasi	9
2.3. Pengertian Pemilihan Umum	15
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Makna Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI 1945	19
3.1.1. Pengaturan Pemilu Dalam UUD NRI Tahun 1945	23
3.1.2. Makna Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945	31
a. Penafsiran Gramatikal	33
b. Penafsiran Originalisme	36
3.2. Proporsional Tertutup Dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945	53
3.2.1. Sistem Pemilu di Indonesia	55
3.2.2. Proporsional Tertutup Dalam Perspektif UUD NRI Tahun 1945	60
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	68
Daftar Pustaka	69